



Analisis Determinasi Kemiskinan di Provinsi Maluku Periode 2019–2023 : Pendekatan Regresi Data Panel

Haidar Akhmad Al Barabasi ^{1*}, dan Hastarini Dwi Atmanti ²

¹ Fakultas Ekonomika dan Bisnis; Universitas Diponegoro; Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Kampus Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, e-mail : haidarakhmadalb@gmail.com

² Fakultas Ekonomika dan Bisnis; Universitas Diponegoro; Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Kampus Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, e-mail : hastarinidwiatmanti@live.undip.ac.id

* Corresponding Author : Haidar Akhmad Al Barabasi

Abstract: This study aims to analyze the effect of Gross Regional Domestic Product (PDRB), Human Development Index (IPM), and Unemployment Rate on poverty levels in Maluku Province during the 2019-2023 period. A panel data regression approach was employed, allowing a comprehensive analysis by combining cross-sectional and time-series data. The results show that PDRB has a positive effect on poverty, while IPM has a significant negative effect, indicating that improvements in quality of life can reduce poverty. In contrast, the unemployment rate does not show a significant effect on poverty. Overall, the regression model used has a high explanatory power, with an R-squared of 0.952. This study contributes significantly to understanding the factors influencing poverty in island regions and provides insights for formulating more effective development policies in Maluku Province.

Keywords: GRDP; HDI; Unemployment Rate; Poverty

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku selama periode 2019-2023. Pendekatan yang digunakan adalah regresi data panel, yang memungkinkan analisis menyeluruh dengan menggabungkan data lintas wilayah dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap kemiskinan, sementara IPM berpengaruh negatif dan signifikan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas hidup dapat mengurangi kemiskinan. Sebaliknya, tingkat pengangguran tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Secara keseluruhan, model regresi yang digunakan memiliki daya jelaskan yang sangat tinggi, dengan R-squared sebesar 0,952. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di wilayah kepulauan, serta memberikan wawasan bagi perumusan kebijakan pembangunan yang lebih efektif di Provinsi Maluku.

Kata kunci: PDRB; IPM; Tingkat Pengangguran; Kemiskinan

Received: 25 Juni 2025
Revised: 3 Agustus 2025
Accepted: 21 November 2025
Published: 22 November 2025
Curr. Ver.: 22 November 2025



Copyright: © 2025 by the authors.
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

1. Pendahuluan

Kemiskinan menjadi persoalan sosial yang memunculkan dampak persisten dimasa modern ini. Fenomena ini terjadi akibat ketakcakapan sebagian individu dalam menjalani kehidupan yang layak secara manusiawi dan bermartabat [24]. Kemiskinan dapat terlihat dari kesulitan dalam aspek finansial maupun dalam pemenuhan barang kebutuhan dasar [12]. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan dan minimnya kepemilikan aset yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan [5]. Akibatnya, pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memiliki peran penting dalam menangani kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah harus segera merumuskan langkah-langkah strategis untuk

mengatasi kemiskinan secara efektif. Menurut [6] kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar tanpa mengukur pengeluaran. Ini tidak hanya diukur dari tingkat pendapatan, tetapi juga dari segi sosial, lingkuan, keberdayaan, dan partisipasi [2]. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat pengangguran dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang rendah dalam pengelolaan sumber daya alam [18].

Provinsi Maluku tercatat sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, menduduki peringkat ke-8 dengan persentase penduduk miskin mencapai 16,05%, yang berarti sekitar 297.680 orang tergolong miskin [9]. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah Maluku, kenyataannya provinsi ini masih menghadapi tantangan yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Berbagai program dan kebijakan yang dirancang untuk menanggulangi kemiskinan, seperti peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, meskipun telah memberikan dampak positif, belum mampu sepenuhnya mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih sangat terasa di banyak daerah. Problem kemiskinan di Maluku bukan hanya masalah di daerah itu sendiri; itu juga merupakan masalah yang sama di daerah lain di timur Indonesia, seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, karena faktor-faktor struktural dan historis yang telah berkembang selama bertahun-tahun, wilayah-wilayah ini menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengatasi kemiskinan. Meskipun pemerintah pusat telah memberikan perhatian dan berbagai program bantuan, masalah kemiskinan di wilayah timur Indonesia masih kompleks dan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang diterapkan harus lebih memperhatikan keadaan lokal dan memperhatikan faktor-faktor khusus yang mempengaruhi kemiskinan. Fokus kebijakan harus berada pada pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesetaraan masyarakat [15].

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan multidimensional yang masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional, khususnya di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan, serta pelayanan kesehatan seperti di Provinsi Maluku [3]. Tidak hanya rendahnya pendapatan adalah bagian dari masalah kemiskinan, masalah ini mencakup keterbatasan dalam akses ke sumber daya, kesempatan kerja, dan kualitas hidup secara umum [20]. Akibatnya, pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam program pembangunan baik di daerah maupun nasional. Dalam provinsi Maluku, ada sebelas kabupaten/kota yang merupakan kepulauan. Mereka terkenal dengan adat budaya mereka, pariwisata, dan kekayaan alam yang luar biasa. Namun, kemiskinan masih ada di Maluku hingga saat ini. Tabel 1 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku tahun 2019-2023:

Tabel 1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Maluku 2019-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)			Presentase Penduduk Miskin (%)		
	K	D	K+D	K	D	K+D
2019	45,60	272,09	317,69	5,84	26,83	17,69
2020	49,89	268,30	318,18	6,23	26,21	17,44
2021	49,78	272,03	321,81	6,29	26,96	17,87
2022	45,12	245,45	290,57	5,82	23,50	15,97
2023	43,33	258,28	301,61	5,49	24,64	16,42

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku

Tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku meningkat dari 2019 hingga 2023, menurut Tabel 1. Pada 2019, jumlah penduduk miskin di Kota (K) sebanyak 45,60 ribu jiwa, dan di Desa (D) sebanyak 272,09 ribu jiwa, dengan total 317,69 ribu jiwa. Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Kota turun menjadi 43,33 ribu jiwa, dan di Desa juga turun menjadi

258,28 ribu jiwa, dengan total 301,61 ribu jiwa. Begitu pula dengan persentase penduduk miskin, yang pada tahun 2019 di Kota sebesar 5,84 persen, di Desa 26,83 persen.

Pada literatur ekonomi regional, berbagai studi menunjukkan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh sejumlah faktor ekonomi dan sosial [21]. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan indikator utama pertumbuhan ekonomi daerah, merefleksikan total nilai barang dan jasa dari berbagai sektor ekonomi dalam suatu wilayah pada periode tertentu. PDRB sangat penting karena menunjukkan sejauh mana suatu daerah mampu menghasilkan barang dan jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan penelitian [13] variabel PDRB menunjukkan pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 34 provinsi di Indonesia. Hal ini berarti, meskipun PDRB mengalami peningkatan, hal tersebut belum cukup untuk menurunkan kemiskinan. Peningkatan PDRB justru dapat berkontribusi pada kenaikan tingkat kemiskinan, meskipun pengaruhnya tidak signifikan. Hal ini sesuai dengan teori kemiskinan relatif, menyatakan bahwa garis kemiskinan akan bergerak seiring dengan perbaikan kondisi perekonomian masyarakat yang dipengaruhi oleh inflasi, sehingga kemiskinan tetap ada meskipun perekonomian tumbuh. Asumsi ini juga didukung penelitian [14] hubungan searah antara pertumbuhan PDRB dan tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa peningkatan PDRB tidak selalu berarti penurunan kemiskinan. Temuan ini bertentangan dengan pandangan ekonomi klasik yang meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi akan otomatis menurunkan angka kemiskinan. Namun, hal ini dapat dijelaskan melalui teori distribusi pendapatan, di mana pertumbuhan yang tidak merata dan tidak menjangkau kelompok miskin justru memperdalam ketimpangan. Meski begitu, PDRB tetap menjadi indikator penting dalam mengatasi kemiskinan, karena pertumbuhan ekonomi yang inklusif berpotensi membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki kualitas hidup. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi stagnan atau tidak menyeluruh, maka ketimpangan dan kemiskinan dapat semakin memburuk.

Pada sisi lain salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mencerminkan capaian pembangunan manusia dari tiga dimensi dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi ini memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan sangat berkaitan dengan kondisi kemiskinan (BPS, 2024). Daerah dengan IPM yang rendah umumnya menghadapi tantangan dalam akses layanan kesehatan, kualitas pendidikan, serta pendapatan masyarakat yang minim. Kondisi ini berkontribusi pada tingginya tingkat kemiskinan karena masyarakat tidak memiliki kapasitas memadai untuk keluar dari perangkap kemiskinan [28]. Sebaliknya, peningkatan IPM dapat memperkuat kemampuan individu untuk hidup produktif dan layak. Pendidikan yang lebih baik membuka peluang kerja, kesehatan yang terjaga meningkatkan produktivitas, dan pendapatan yang layak memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Dengan demikian, IPM menjadi indikator yang berkontribusi menurunkan tingkat kemiskinan, dan peningkatannya dapat dijadikan strategi dalam pembangunan daerah yang miskin [27]. Penelitian [22] menggarisbawahi peran positif peningkatan IPM dalam mereduksi kemiskinan. Artinya, semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, maka semakin rendah tingkat kemiskinan yang cenderung terjadi. Hal ini disebabkan karena IPM mencerminkan kualitas sumber daya manusia, meliputi aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Ketiga aspek tersebut merupakan pondasi penting dalam mendorong masyarakat keluar dari kemiskinan.

Tingkat pengangguran merupakan salah satu faktor yang turut memengaruhi tingkat kemiskinan. Indikator ini mengukur persentase penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja namun tidak memiliki pekerjaan dalam suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin besar pula potensi peningkatan angka kemiskinan, karena keterbatasan akses terhadap pekerjaan berdampak langsung pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat [8]. Indikator ini mencerminkan seberapa besar proporsi penduduk usia kerja yang aktif mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan. Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan rendahnya serapan tenaga kerja dalam perekonomian, yang berimplikasi langsung pada pendapatan rumah tangga. Ketika banyak individu tidak memiliki pekerjaan yang layak, maka kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar menjadi terbatas, sehingga mendorong peningkatan angka kemiskinan [27]. Pengangguran yang tinggi menandakan adanya ketidakseimbangan antara keterampilan tenaga kerja dan permintaan pasar, serta lemahnya

penciptaan lapangan kerja produktif. Sebaliknya, rendahnya tingkat pengangguran mencerminkan bahwa sebagian besar angkatan kerja telah memperoleh pekerjaan, yang berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan dan menurunkan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, tingkat pengangguran menjadi salah satu indikator utama yang berkaitan erat dengan kemiskinan, khususnya dalam konteks analisis ekonomi ketenagakerjaan. Penelitian yang dilakukan [16] tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti bahwa semakin tinggi angka pengangguran, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan. Indikator ini merepresentasikan proporsi penduduk usia kerja yang secara aktif mencari pekerjaan namun belum memperoleh kesempatan kerja. Tingginya tingkat pengangguran mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dan kesempatan kerja yang ada, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kemiskinan. Penelitian tersebut didukung juga oleh [4] menemukan bahwa tingkat pengangguran terbuka memiliki hubungan positif dan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Peningkatan tingkat pengangguran menyebabkan kurangnya produktivitas masyarakat, yang pada gilirannya membuat mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini kemudian memperburuk kondisi kemiskinan yang ada.

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB, IPM, dan Tingkat Pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku dalam periode 2019 hingga 2023, dengan menggunakan metode regresi data panel, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan empiris mengenai bagaimana ketiga variabel tersebut memengaruhi dinamika kemiskinan di level daerah. Pendekatan data panel memungkinkan analisis yang lebih komprehensif karena menggabungkan aspek lintas wilayah (*cross section*) dan waktu (*time series*), sehingga mampu menangkap pola dan tren yang mungkin terlewatkan jika hanya menggunakan data time series atau cross section secara terpisah. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan data panel dalam konteks wilayah kepulauan seperti Maluku, yang masih jarang dijadikan objek studi dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti perbedaan antarwilayah dalam hal capaian pembangunan dan dampaknya terhadap kemiskinan, yang memberikan kontribusi penting dalam diskursus akademik mengenai ketimpangan dan keadilan sosial di tingkat regional. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan studi ekonomi regional, serta menjadi rujukan praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan tepat sasaran untuk menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Maluku.

2. Kajian Pustaka atau Penelitian Terkait

Teori Lingkaran Kemiskinan (Nurkse) menjelaskan kemiskinan sebagai siklus stagnan: rendahnya produktivitas → pendapatan minim → tabungan nihil → investasi terhambat → keterbelakangan SDM → produktivitas rendah. Penelitian [26] dan [10]; [17] mengonfirmasi teori ini dengan temuan bahwa rendahnya kualitas SDM (pendidikan) dan terbatasnya akses infrastruktur memperpanjang siklus kemiskinan. Di Maluku, faktor geografis kepulauan memperparah lingkaran ini karena isolasi ekonomi dan kesenjangan infrastruktur. Pendekatan Multidimensi Kemiskinan [10] menekankan bahwa kemiskinan tidak hanya diukur secara ekonomi, tetapi mencakup lima dimensi: ekonomi, ketidakberdayaan politik, kerentanan sosial, ketergantungan psikologis, dan isolasi geografis. Dalam konteks Maluku, dimensi geografis ini krusial mengingat tersebarnya permukiman di pulau-pulau terpencil. Regresi Data Panel sebagai Metode Analisis dipilih berdasarkan temuan empiris [7] dan [8] yang membuktikan *Fixed Effect Model (FEM)* lebih akurat menangkap heterogenitas antardaerah dibandingkan REM atau CEM. Keunggulan FEM adalah kemampuannya mengontrol variabel spesifik individu (misalnya: karakteristik geografis kabupaten) yang tidak terobservasi. Dalam konteks Maluku, model ini tepat untuk mengisolasi pengaruh kebijakan daerah terhadap kemiskinan selama periode 2019–2023. Peran Pembangunan Manusia dan Infrastruktur diintegrasikan melalui perspektif UNDP (melalui IPM) yang menekankan tiga pilar: kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Temuan [26] menunjukkan bahwa peningkatan IPM berkorelasi negatif dengan kemiskinan. Namun, studi [17] mengingatkan bahwa di daerah tertinggal, pembangunan manusia harus diiringi peningkatan infrastruktur. Di Maluku, akses listrik dan air bersih yang

masih rendah [8] berpotensi menghambat efektivitas program pengentasan kemiskinan meskipun IPM meningkat.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis determinan kemiskinan di Maluku pada periode 2019–2023, yang mencakup fase krisis dan pemulihan ekonomi akibat pandemi. Penelitian ini juga mengintegrasikan variabel kebijakan seperti bantuan sosial dan inflasi bersama variabel makro konvensional, serta menggunakan pendekatan regresi data panel. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperbarui bukti empiris terkait kemiskinan di Maluku, tetapi juga menawarkan pendekatan metodologis yang lebih komprehensif dan relevan untuk mendukung perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan di masa mendatang.⁸⁸

3. Metode yang Diusulkan

Penelitian dilakukan pada provinsi Maluku periode 2019 - 2023, dengan data sekunder yang diperoleh dari BPS. Menggunakan objek variabel independen yaitu PDRB, IPM, Tingkat Pengangguran. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Metode analisis ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di provinsi kabupaten/kota. Dibawah ini, persamaan model regresi data panel :

Keterangan :

γ	: Kemiskinan
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
α	: Konstanta
$\beta_1-\beta_3$: Koefisien Regresi
ϵ_{it}	: Error
i	: Jumlah cross section
t	: Periode waktu

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Pemilihan Model Terbaik Regresi Data Panel

Tabel 2. Hasil Penentuan Regresi Data Panel

1. Chow Test	2. Hausman Test	3. LM Test
H0 : Common Effect Model	H0 : Random Effect Model	H0 : Common Effect Model
H1 : Fixed Effect Model	H1 : Fixed Effect Model	H1 : Random Effect Model
Hasil Uji		
<i>Chow Test</i>	<i>Hausman Test</i>	<i>LM Test</i>
Prob > F = 0.3760	TIDAK PERLU DILAKUKAN	Nilai Prob Breusch-Pagan > α (0.05) = 0.4037

Pengambilan Keputusan :

Menerima H_0 jika $(\text{Prob} \geq F \text{ dan } \text{Prob Breusch-Pagan}) \geq \alpha (0,05)$ atau sebesar 5%

Sumber: Data Diolah (2025)

Hasil penentuan regresi data panel dari Tabel 2 menunjukkan bahwa, berdasarkan hasil *uji Chow*, dengan *p-value* 0,3760, model *Common Effect Model* (CEM) dipilih karena tidak ada perbedaan signifikan antara model *Fixed Effect Model* (FEM) dan model CEM. Dengan demikian, *uji Hausman* tidak perlu dilakukan. Selain itu, hasil *uji Lagrange Multiplier* (LM) menunjukkan *p-value* 0,4037, yang juga lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa model CEM lebih tepat daripada *model Random Effect* (REM).

4.2. Regresi Data Panel Dengan Random Effect Model

Tabel 3. Hasil Common Effect Model

	Coefficient	Std.Error	t-statistic	Prob
Produk Domestik Regional Bruto	0.348	0.050	23.19	0.000
Indeks Pembangunan Manusia	-1.486	0.082	6.89	0.000
Tingkat Pengangguran	0.190	0.153	-18.04	0.229

Sumber: Data Diolah (2025)

$$Y = \alpha + 0.348X_1 + 1.486X_2 + 0.190X_3 + \varepsilon$$

Tabel 3 menunjukkan hasil dari *Common Effect Model* (CEM). Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan koefisien 0,348 dan *p-value* yang sangat kecil (0,000), memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel dependen. Ini menunjukkan bahwa peningkatan PDRB akan meningkatkan tingkat kemiskinan. Secara keseluruhan, PDRB dan IPM memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemiskinan, dengan koefisien -1,486 dan *p-value* 0,000, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi IPM, semakin rendah kemiskinan. Di sisi lain, tingkat pengangguran memiliki koefisien positif 0,190, tetapi *p-value* 0,229 menunjukkan bahwa pengaruhnya terhadap kemiskinan tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5%.

4.3. Pengujian Hipotesis

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 4. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

F-statistic	139,53
Prob (F-statistic)	0,000

Sumber: Data Diolah (2025)

Hasil dari Uji Signifikansi Simultan (Uji F) yang ditampilkan dalam Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *F-statistic* adalah 139,53 dengan nilai *p-value* 0,000. Nilai *p-value* yang sangat kecil (0,000) menunjukkan bahwa semua variabel independen yang digunakan dalam model regresi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara bersamaan. Kesimpulannya, hasil ini menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan valid dan relevan dapat diterima pada tingkat signifikansi tertentu.

b. Koefisien Determinasi (Uji R Square)

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0,952
Adjusted R-squared	0,945

Sumber: Data Diolah (2025)

Hasil koefisien determinasi (R-squared) yang ditunjukkan dalam Tabel 5 adalah sebagai berikut: Nilai *R-squared* adalah 0,952, yang menunjukkan bahwa sekitar 95,2% variasi dalam

variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Nilai *R-squared* yang disesuaikan adalah 0,945, yang sedikit lebih rendah karena telah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dalam model, tetapi nilai *R-squared* yang disesuaikan tetap tinggi (0,955), yang menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan sangat menjelaskan data yang dianalisis.

4.3. Pembahasan

Hasil penelitian yang dilakukan di provinsi Maluku dengan menggunakan variabel Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, serta Tingkat Pengangguran menunjukkan bahwa Variabel X1 atau Produk Domestik Regional Bruto memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel dependen dengan koefisien 0.348 dan *p-value* yang sangat kecil (0.000), menunjukkan bahwa peningkatan PDRB akan meningkatkan Kemiskinan. Temuan ini mungkin tampak paradoks, karena pertumbuhan ekonomi biasanya diharapkan dapat mengurangi kemiskinan. Namun, hasil ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk mengatasi masalah kemiskinan. Faktor-faktor lain, seperti distribusi pendapatan yang tidak merata, kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta ketidaksetaraan dalam kesempatan kerja, mungkin berperan dalam memperburuk kemiskinan meskipun PDRB meningkat. Penemuan ini mendukung temuan terdahulu oleh [11] PDRB yang rendah akan meningkatkan jumlah kemiskinan dalam masyarakat, karena pembangunan yang dilakukan dalam menyejahterakan masyarakat tidak optimal. Kondisi ini terjadi karena pembangunan yang dilakukan dengan tujuan menyejahterakan masyarakat tidak berjalan optimal. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang seharusnya mampu mengurangi angka kemiskinan justru tidak memberikan hasil yang diharapkan. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam perencanaan, pelaksanaan, atau distribusi manfaat dari program-program pembangunan yang ada. Penelitian yang dilakukan oleh [23] menyatakan bahwa PDRB memiliki peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki peranan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. PDRB mencerminkan total nilai tambah dari berbagai sektor ekonomi di wilayah tersebut. Kenaikan PDRB menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi yang produktif, sehingga membuka lebih banyak peluang kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat daya beli. Kondisi ini memberikan dampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan, karena masyarakat memperoleh akses yang lebih besar terhadap sumber penghasilan dan kebutuhan dasar. Oleh sebab itu, PDRB menjadi salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah, terutama dalam usaha menekan tingkat kemiskinan.

Indeks pembangunan manusia atau variabel X2 memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien -1.486 dan *p-value* 0.000, yang berarti semakin tinggi IPM, semakin menurunkan kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam IPM akan diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan, dan hubungan tersebut bersifat signifikan secara statistik. Artinya, semakin tinggi IPM suatu daerah yang mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup maka semakin rendah angka kemiskinan yang terjadi. Temuan ini mempertegas pentingnya pembangunan manusia sebagai salah satu kunci strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat regional. Penelitian yang dilakukan oleh [29] jika IPM meningkat, maka produktivitas kerja manusia akan semakin meningkat dan dari situ juga manusia akan mendapatkan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga angka kemiskinan dapat ditekan. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan kemajuan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Saat IPM mengalami kenaikan, kualitas sumber daya manusia turut meningkat, terutama dalam hal keterampilan, pengetahuan, serta kondisi fisik yang lebih baik. Perbaikan ini berdampak langsung pada produktivitas kerja, karena individu yang sehat dan terdidik memiliki kapasitas lebih besar untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Produktivitas yang lebih tinggi memungkinkan masyarakat memperoleh penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi ini berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan, karena masyarakat tidak lagi berada dalam situasi kekurangan secara ekonomi. Oleh sebab itu, peningkatan IPM menjadi elemen kunci dalam strategi pembangunan yang bertujuan menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh [25], yang menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Peningkatan

IPM di suatu daerah dapat diartikan sebagai perbaikan kualitas sumber daya manusia. Kualitas SDM yang lebih baik akan mendorong peningkatan produktivitas kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan tersebut berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan, karena individu memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Namun, Tingkat Pengangguran atau variabel X3 menunjukkan koefisien positif 0.190, tetapi *p-value* 0.229 menunjukkan bahwa pengaruhnya tidak signifikan terhadap Kemiskinan pada tingkat signifikansi 5%. Nilai ini menunjukkan bahwa secara teori, peningkatan tingkat pengangguran cenderung diikuti oleh peningkatan tingkat kemiskinan. Meskipun demikian, hasil uji statistik menunjukkan *p-value* sebesar 0,229, lebih tinggi dari ambang signifikansi 5% (0,05). Nilai tersebut menandakan bahwa pengaruh variabel Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan tidak signifikan secara statistik. Hubungan antara keduanya tidak cukup kuat untuk dianggap berlaku secara konsisten dalam konteks data yang dianalisis pada periode dan wilayah penelitian ini, meskipun secara konseptual pengangguran tetap menjadi faktor yang berkaitan erat dengan kemiskinan. Temuan konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh [1] bahwa pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini karena tingkat pendapatan keluarga tinggi sehingga mampu membantu biaya hidup anggota keluarga yang masih menganggur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Kondisi ini dapat dijelaskan melalui struktur pendapatan dalam rumah tangga, di mana sebagian besar keluarga memiliki pendapatan yang relatif tinggi. Pendapatan tersebut memungkinkan anggota keluarga yang bekerja untuk menanggung kebutuhan hidup anggota keluarga lainnya yang masih menganggur. Dukungan ekonomi dari keluarga ini berperan dalam menjaga kestabilan kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga, sehingga keberadaan anggota yang menganggur tidak langsung mendorong rumah tangga tersebut masuk dalam kategori miskin. Fenomena ini mencerminkan peran solidaritas keluarga dalam mengatasi risiko ekonomi dan dapat menjadi salah satu faktor yang melemahkan hubungan langsung antara pengangguran dan kemiskinan di wilayah penelitian.

5. Kesimpulan

Penelitian ini untuk mempelajari bagaimana Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran (TP) memengaruhi tingkat kemiskinan pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Maluku dari tahun 2019 hingga 2023. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah yang dikaji. Selain itu, variabel IPM memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan secara parsial, sementara variabel TP tidak memiliki dampak yang signifikan. Penelitian ini membahas ketimpangan pembangunan antardaerah di Maluku, hubungan pembangunan manusia dengan penurunan kemiskinan, dan seberapa efektif kebijakan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan holistik dalam mengatasi kemiskinan, terutama melalui peningkatan pendidikan, layanan kesehatan, dan akses ke pekerjaan yang menguntungkan. Secara keseluruhan, penelitian ini membantu memperluas penelitian ekonomi regional, terutama memahami bagaimana kemiskinan berkembang di daerah kepulauan seperti Provinsi Maluku. Hasil ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk membangun strategi pembangunan yang lebih efisien dan berkeadilan antarwilayah.

Daftar Pustaka

- [1] Aini, L. N., & Islamy, S. N. (2021). Dampak pengangguran, pendidikan, kesehatan, PDRB dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Indonesia. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 1(3), 132–141. <https://doi.org/10.53088/jerps.v1i3.325>
- [2] Alfina, W. R. A. (2023). Analisis Regresi Data Panel Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Tahun 2012-2021. *JIE*, 7(1).
- [3] Andrianus, F., & Alfatih, K. (2023). Pengaruh Infrastruktur terhadap Kemiskinan: Analisis Data Panel 34 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 54–60. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i1.206>

- [4] Ardian, R., Yulmardi, Y., & Bhakti, A. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi Aktual*, 1(1), 23–34. <https://doi.org/10.53867/jea.v1i1.3>
- [5] Azizah, E. W., Sudarti, & Kusuma, H. (2018). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2, 167–180.
- [6] Bappenas. (2022). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*.
- [7] Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. *Journal of Econometrics*, 87, 115–143.
- [8] BPS. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia 2023*.
- [9] BPS. (2024). *Profil Kemiskinan di Maluku Maret 2024*.
- [10] Chambers, R. (2010). Paradigms, Poverty and Adaptive Pluralism. *IDS Working Papers*, 2010(344), 01–57. https://doi.org/10.1111/j.2040-0209.2010.00344_2.x
- [11] Damanik, R. K., & Sidauruk, S. A. (2020). Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pdrb Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Dharma Agung*, 28(3). . *Jurnal Dharma Agung*.
- [12] Guampe, F. A., Walenta, A. S., & Kawani, F. B. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2001-2021. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 6(1), 92–102. <https://doi.org/10.29408/jpek.v6i1.5536>
- [13] Kusuma, D. F., & Iskandar, D. D. (2022). Pengaruh PDRB, IPM dan Kapasitas Fiskal Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia: Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2019. *Diponegoro Jurnal of Economics*, 11(4), 9–19. <https://doi.org/10.14710/djoe.35116>
- [14] Leonita, L., & Sari, R. K. (2019). Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.24269/iso.v3i2.252>
- [15] Margareni, N. P. A. P., Djayastra, I. K., & Yasa, I. M. (2016). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal Piramida*, 12(1), 101–110.
- [16] Nengsih, T. A., Saqina, N., Maula, N., & Oktavia, F. A. (2024). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi. *Jurnal Masharif Al-Syariab: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(3). <https://doi.org/10.30651/jms.v9i3.23064>
- [17] Ngole Bunga, E., & Haryanto, T. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2023. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 8(3).
- [18] Nugroho, M. L. E., & Mardiansjah, F. H. (2016). Pergeseran Kebijakan Tata Ruang Kota Semarang 1975-2011 : Dari Pembangunan Sektoral Menuju Keterpaduan Ruang. *Jurnal Pembangunan Wilayah e-Kota*, 12(4), 400–417.
- [19] Pajriah, S., & Suryana, A. (2018). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan Di Desa Pasirlawang Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis. *Jurnal Artefak: History and Education*, 5(2). <https://doi.org/10.25157/ja.v5i2.1939>
- [20] Purwanti, E. (2024). Analisis Deskriptif Profil Kemiskinan Indonesia Berdasarkan Data BPS Tahun 2023. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(1), 1–10.
- [21] Putra, W. A. P., & Sukartini, N. M. (2025). Pengaruh Pendidikan, PDRB dan Tipe Pemerintah Terhadap Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah MEA*, 9(1), 530–546.
- [22] Sagala, I. F., Romadhoni, A. F., Mardiana, A., Widayat, A., Simamora, D. R., Nurfadiah, D., Ananda, E., Sembiring, B., Harahap, I. A., Siregar, E., Alif, M. F., Adella, N., Augustian, R., & Sihotang, R. F. (2024). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara Menggunakan Metode Regresi Linear Berganda. *Jurnal Matematika Dan Ilmu Pengelatuan Alam*, 2(2), 309–324. <https://doi.org/10.59581/konstanta-widyakarya.v2i2.3524>

- [23] Sari, E. P., & Novianti. (2024). Pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan di Kalimantan Barat Tahun 2017-2022. *Ekodestinasi*, 2(1), 36–56. <https://doi.org/10.59996/ekodestinasi.v2i1.409>
- [24] Suhandi, N., Putri, E. A. K., & Agnisa, S. (2018). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kemiskinan Menggunakan Metode Regresi Linear di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Informatika Global*, 9(2). <https://doi.org/10.36982/jiig.v9i2.543>
- [25] Suripto, & Subayil. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan,Pengangguran,Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Yogyakarta Periode 2010-2017. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1.
- [26] Telau, Y., Engka, D. S. M., & Rompas, W. I. F. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Maluku Utara Tahun 2005 - 2020. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(7).
- [27] Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Pearson Education.
- [28] UNDP. (2020). *UNDP Annual Report 2020 | United Nations Development Programme*. <https://www.undp.org/publications/undp-annual-report-2020>
- [29] Zahra, B. S., Mevia, R. D. A., Sona, R. A., & Rohmi, M. L. (2024). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung Pada Priode 2012-2023. *JBEP: Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 1(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jbep.v1i3>